



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	15 Juni 2023	Media	Singgalang
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	503

Harian Umum Independen

SINGGALANG

Membina Harga Diri untuk Kesejahteraan Nusa dan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 15 Juni 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ANALISIS KOTA PARIAMAN TA 2022

Seluruh Fraksi Setujui Ranperda

PARIAMAN - SINGGALANG

Seluruh Fraksi di DPRD Kota Pariaman setuju Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA 2022 dan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 di jadikan Perda.

Hal tersebut disampaikan masing masing juru bicara fraksi dalam rapat istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Bulyandi didampingi Wakil Ketua, Efrizal dan Mulya di serta dihadiri anggota DPRD, Kepala OPD dilindungi Pariko Pariaman di Aula DPRD setempat, Selasa (13/6).

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Harpen Agus Bulyandi didampingi wakil ketua dan beberapa

anggota DPRD, di Aula DPRD, Manggung (13/6).

Wakil Walikota Mardison Mahyuddin, yang diberikan amanat oleh Walikota Pariaman Genius Umar untuk menyampaikan sambutan, mengatakan dengan telah disampaikannya pandangan akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman yang dilanjutkan dengan penanda tangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, maka kita telah dapat melanjutkan proses berikutnya yakni penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 ke Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.

"Diharapkan proses berikut-

nya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan," imbuh Mardison.

Selanjutnya, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang dituangkan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), merupakan pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program unggulan pemerintah Kota Pariaman serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Pariaman.

"Kedepannya saya meminta seluruh pimpinan OPD dan jajaran Pemerintah Kota Pariaman agar lebih meningkatkan kinerja yang disertai upaya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga kita dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI," terangnya lagi.

Ia, selaku Wawako mendampingi Genius Umar sebagai Wako Pariaman periode 2018-2023, menyampaikan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan LKPD terakhir dari periode kepemimpinan Genius Mardison, dimana terhitung mulai 9 Oktober 2023 nanti pengabdian kami berdua berakhir.

Oleh karena itu, tambah Mardison, pada kesempatan itu ia menyampaikan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan. Sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah berjalan dengan kondusif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. (503)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	15 Juni 2023	Media	Singgalang
Kategori	SOSIAL & AGAMA	Jurnalis	503

Harian Umum Independen

SINGGALANG

Membina Harga Diri untuk Kesejahteraan Nusa dan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 15 Juni 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DARI PENILAIAN VLH NASIONAL

Pariaman Sangat Serius Dukung Kota Layak Anak

PARIAMAN - Kota Pariaman terpilih mengikuti Penilaian Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara virtual melalui zoom, bertempat di ruang rapat Walikota Pariaman, Selasa (13/6) lalu.

VLH Evaluasi Kota Layak Anak tersebut diikuti oleh Walikota Pariaman, Genius Umar didampingi Sekdako Pariaman, Yota Balad, Wakil Ketua DPRD, Mulyadi, Ketua TP-PPK Kota Pariaman, Ny. Lucyamel Genius, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, LKAAM, Bundo Kandang, dan Pengurus Forum Anak Kota Pariaman.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, dan tim yang melaksanakan verifikasi lapangan hybrid kota layak anak untuk Kota Pariaman.

"Pemko Pariaman sangat serius dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Pariaman, hal ini

dibuktikan dengan Kota Pariaman yang telah menyandang predikat Kota Layak Anak kategori Madya selama 6 kali berturut-turut, dan tahun ini memasuki tahun ketujuh," ujarnya.

Genius mengatakan, untuk mewujudkan Kota Pariaman menyandang KLA ini tidaklah mudah, perlu komitmen yang kuat, kapasitas kelembagaan yang mumpuni, juga kesamaan paradigma mengenai anak, dan kolaborasi yang sinergis.

Oleh sebab itu, lanjut Genius, untuk memenuhi kebijakan, program dan kegiatan dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak tersebut, kita terus bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari DPRD, instansi vertikal, seperti Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri serta OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, BUMN/BUMD, Swasta, Perbankan, LKAAM dan juga Forum Anak Kota Pariaman, dengan membuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Pariaman.

Pihaknya juga menegaskan setiap OPD yang ada, harus berkontribusi dalam mendukung KLA di Kota Pariaman. Dan itu sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Kemudian, untuk memperkuat kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), perempuan, dan anak, Pemko Pariaman telah membentuk berbagai kelembagaan sebagai berikut: Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, Pembentukan Pusat Informasi Layak Anak (PISA), Pembentukan Gugus Tugas Focal Point, Pembentukan Forum Data Gender, Pembentukan P2TP2A, Pembentukan Satgas P2TP2A tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pembentukan Kecamatan Layak Anak, Pembentukan Desa Layak Anak, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, Pembentukan Puskesmas Ramah Anak, Pembentukan Poskesdes Ramah Anak, Pembentukan Sekolah Ramah Anak, Pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRRA) Sudah Tersertifikasi Kementerian PPPA, Pembentukan Forum Anak (Kota, Kecamatan, Desa & Kelurahan), Pembentukan Forum Lansia, Pembentukan KPPI, Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja/PIK R Seluruh Sekolah, Pembentukan DRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak), Pemerintah juga selalu melibatkan Forum Anak,

91



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	15 Juni 2023	Media	Singgalang
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	503

Harian Umum Independen

SINGGALANG

Membina Harga Diri untuk Kesejahteraan Nusa dan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KLIPING KORAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 15 Juni 2023

Pemko dan Kejari Gelar FGD Tugas Dan Fungsi Kejaksaan

Pariaman, Singgalang
Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Tugas Dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

FGD ini terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, di Aula Balaikota Pariaman.

Mardison menyampaikan setiap pekerjaan yang dilakukan tentu saja butuh perencanaan yang matang dan jelas sehingga pembangunan di Kota Pariaman bisa berjalan dengan lancar, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kota hingga tingkat forum yang lebih tinggi.

"Tapi ada yang harus diingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tentu saja selalu berada dibawah pengawasan hukum, jika ada kesalahan atau kecurangan dalam melakukan kegiatan tersebut otomatis akan langsung berurusan dengan hukum, untuk itu saya minta setiap OPD bekerjasama dengan aturan hukum yang telah ditetapkan," kata Mardison. Dijelaskannya kejaksaan

bukan hanya melaksanakan kewenangan penyidikan atau melakukan penuntutan tindak pidana di pengadilan, akan tetapi juga memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam kesempatan itu Mardison Mahyuddin juga sampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kajari Pariaman Bagus Priyonggo dan seluruh jajaran atas kerjasamanya sebagai narasumber

kegiatan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, dan tidak menyalahi aturan, maka tindakan tepat atau tidaknya kegiatan yang dilakukan itu bisa diukur dengan dua aturan yaitu, pertama otorisasi (bahwa pejabat itu harus berwenang), dan kedua mekanisme (kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan).

Terkait dengan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (datun) ada tiga tindakan yang dapat diberikan terhadap kejaksaan yaitu, pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan, kedua pendampingan hukum (legal assistance) yang diberikan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung, dan audit hukum (legal audit) diberikan terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan.

"Melalui fungsi dan peran yang dimiliki Kejaksaan ini maka Kajari Pariaman melakukan sinergitas dengan pemerintah kota pariaman agar proses pembangunan yang dilakukan Pemko Pariaman dapat berjalan dengan baik dan benar," ucap Bagus. (503)

tunggal dalam FGD ini.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh OPD Kota Pariaman dapat mengikuti, memahami fungsi dan kewenangan kejaksaan selaku pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan", ucap Mardison.

Sementara itu, Kejari Pariaman Bagus Priyonggo menerangkan bahwa tidak semua kegiatan tersebut ada aturan hukumnya, tapi agar program



BERSAMA - Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin bersama dengan sejumlah peserta FGD. (*)

83

